

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Teoritis**

##### **2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Thomas R. Dye (Anggara, 2014:35) menjelaskan kebijakan publik yaitu semua yang dilakukan maupun tidak dilakukan, dengan suatu alasan kebijakan harus diselesaikan untuk membantu kehidupan bersama, harus menjadi pemikiran yang komprehensif sehingga kebijakan secara umum mempengaruhi semua masyarakat dan tidak memberi kerugian, dalam hal ini pemerintah harus cerdas dalam menentukan keputusan.

Said Abidin mejelaskan, kebijakan publik bukanlah sesuatu hal baru lalu terbatas, tetapi luas dan terletak pada lapisan-lapisan esensial. Dengan cara ini, kebijakan publik menjadi tolak ukur keseluruhan untuk strategi dan pilihan eksplisit di bawahnya.

William N. Dunn menjelaskan dalam kebijakan publik ialah alternatif yang saling berkaitan yang dibuat pihak yang berkepentingan atau pegawai pemerintah pada hal yang berkaitan dengan kewajiban pemerintahan, yaitu penjaga keamanan, energi, kesejahteraan, pendidikan, intruksi, bantuan pemerintah, kriminalitas, perkotaan dan sebagainya (Pasolong, 2014:39)

Kebijakan publik tidak dapat dihindarkan dari proses politik. Maka dari itu, kita dapat menegaskan kembali bahwa proses politik dalam institusi demokrasi atau institusi yang kurang demokratis menghasilkan kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menjadi lebih dari produk atau output administrasi publik. Akan tetapi. Produk administrasi publik seperti pemerintahan dinegara-negara berkembang masih mempunyai akuntabilitas terbesar pada kebijakan publik, karena sekali lagi keahlian perkembangan dan administrasi kebijakan adalah orang-orang pemerintah (Nugroho, 2014:108)

Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan, Kebijakan publik merupakan cara yang diambil lalu diputuskan pemerintah demi kepentingan bersama, seperti Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan lain dimana hal tersebut dibentuk dengan maksud tujuan akan masyarakat dapat hidup dengan aman.

### **2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik**

Kebijakan publik pada dasarnya adalah tindakan yang khas (*unique activity*), dimana memiliki cirri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain, sebagai berikut (Abdul Wahab, 2016:20-24).

1. Kebijakan publik adalah tindakan yang memiliki maksud untuk memajukan tujuan tertentu, bukan hanya perilaku yang aneh atau kegiatan yang benar-benar tidak teratu, ceroboh dan tidak langsung. Kebijakan publik merupakan pengaturan dalam kemajuan atau pendekatan sosial dalam kerangka politik saat ini bukanlah kegiatan semena-mena tetapi merupakan kegiatan yang teratur(*by planed*).

2. Kebijakan pada dasarnya memiliki kegiatan dimana saling berpengaruh dan direncanakan dengan tujuan mendorong otoritas pemerintah.
3. Kebijakan adalah hal yang betul-betul ditujukan kepada otoritas publik di bagian-bagian khusus.
4. Kebijakan publik bias bersifat mendukung atau tidak mendukung. Ketika struktur dikatakan mendukung, kebijakan publik dapat memasukan beberapa jenis kegiatan pemerintah dimana telah direncanakan guna untuk memberi dampak tujuan dari isu-isu. Sebaliknya ketika struktur tidak mendukung, akan memasukan keputusan untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan apa-apa terhadap persoalan dimana bantuan pemerintah benar-benar penting.

### **2.1.3 Tahapan Kebijakan Publik**

Tahapan tahapan kebijakan publik, William Dunn (Anggara, 2014:120-121) dijabarkan seperti:.

1. Penyusunan agenda

Agenda setting merupakan tahapan paling tepat terhadap suatu kebenaran kebijakan publik. Dimana interaksi ini berada disuatu tempat untuk menguraikan isu dan kebutuhan publik. Jika suatu masalah dapat terhubung dan memperoleh status bagi sebagai masalah publik dan membutuhkan rencana publik, masalah tersebut memiliki hak istimewa untuk ditunjuk sebagai aset yang lebih terbuka dari pada masalah lain.

2. Formulasi Kebijakan

Isu yang ada pada rencana agenda kebijakan, lalu dilakukan pemeriksaan oleh pembuat kebijakan. Masalah tersebut artikan untuk dicari pemecah masalah

yang terbaik. Pemecah masalah berasal dari berbagai pilihan strategis atau pilihan kebijakan yang ada. Ini merupakan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Pada proses perumusan kebijakan, tiap-tiap strategi bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang akan dipilih untuk mengatasi permasalahan.

### 3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat dilakukan oleh kedaultan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Meskipun demikian warga negara harus menerima bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Legitimasi dapat diawasi dengan kontrol gambar tertentu dengan proses ini orang belajar untuk membantu pemerintah.

### 4. Penilaian Atau Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai bisnis termasuk penilaian atau evaluasi kebijakan adalah sesuatu yang menggabungkan substansi dan dampak (Winarni, 2008:225). Untuk evaluasi ini dilihat sebagai tindakan yang berguna. Hal ini dikatakan bahwa penilaian terhadap evaluasi tidak hanya dilaksanakan pada tahap terakhir namun dilakukan pada tahap yang bersamaan, oleh karena itu evaluasi kebijakan ialah menggabungkan perumusan masalah, rencana pilihan dalam mengatasi persoalan, pelaksanaan, dan tahapan kebijakan.

#### **2.1.4 Urutan Proses Pembuatan Kebijakan Publik**

Urutan suatu perumusan kebijakan tentunya terdapat hal-hal paling diutamakan dalam pembuatannya. Menurut Nugroho (Hayat, 2018:26-27), memberikan pendirian yang signifikan dalam proses kebijakan publik, bahwa dalam kebijakan publik terdapat pengelompokan yg lebih spesifik yaitu.

1. Kepercayaan akan kebaikan, Kebaikan dalam kebijakan publik terkandung dalam arah dan penalaran yang dibangun dalam mewujudkan kepentingan publik atau masyarakat. Setiap kebijakan pada tingkat dasar berguna untuk kepentingan umum. Sehingga ketika kebijakan itu dirasakan dan betul-betul dirasakan manfaatnya dan tujuannya untuk masyarakat, kekuatan *trust* masyarakat akan semakin tinggi.
2. Nilai-Nilai dan Norma, kebijakan juga mempunyai nilai dan norma yang terkandung didalamnya itu apakah sesuai dengan standar yang ada atau tidak, terlepas dari apakah kualitas yang terkandung dalam sebuah kebijakan melanggar kode moral atau nilai substansi dari kebijakan itu sendiri.
3. Proses politik, kebijakan sebagai hasil interaksi politik. Kebijakan yang sudah masuk ke dalam standarisasi politik akan mengeluarkan keputusan bersama. Melakukan pendekatan dalam sebuah kebijakan adalah lumrah untuk mengolkan visi, misi, dan tujuan dari kebijakan itu.

#### **2.1.5 Jenis-jenis kebijakan publik**

Banyak ahli yang mengusulkan jenis kebijakan publik tergantung pada perspektif masing-masing. Anderson Subarsono (Pasolong, 2014:40) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan *substantive* versus kebijakan *procedural*

Kebijakan *substantive* merupakan kebijakan yang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan *procedural* adalah bagaimana kebijakan *substantive* tersebut dapat dijalankan.

2. Kebijakan *distributive* versus kebijakan regulatori versus kebijakan

*redistributive*. Kebijakan *distributive* menyangkut penyampaian pelayanan atau keuntungan pada masyarakat atau orang-orang. Kebijakan regulatori adalah kebijakan sebagai pembatasan atau larangan terhadap perilaku orang atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan *redistributive* adalah kebijakan yang mengontrol alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat

3. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public good*) dan barang

privat (*private goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau jasa.

### **2.1.6 Proses kebijakan**

Dunn menjabarkan hal untuk menyelesaikan permasalahan politik ialah: 1) Penetapan agenda kebijakan, 2) Adopsi kebijakan, 3) Implementasi Kebijakan, 4) Evaluasi Kebijakan. Menurut Anderson , sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut: 1) Formulasi masalah, 2) Formulasi Kebijakan, 3) penentuan kebijakan, 4) Implementasi kebijakan, 5) Evaluasi kebijakan. Sedangkan menurut AG. Subarsono mengatakan bahwa proses

kebijakan publik ialah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. (pasolong, 2014:41).

### **2.1.7 Analisis kebijakan publik**

Menurut William Dunn mengatakan analisis kebijakan ialah disiplin ilmu sosial terapan dengan memakai beragam teknik penelitian serta argument dengan maksud mendapatkan dan membagi informasi pasti dengan kebijakan, biasanya digunakan di tingkat politik dengan maksud menyelesaikan permasalahan kebijakan. Nugroho mejelskan pengertian terhadap kebijakan dan pembelajaran dalam menentukan suatu kebijakan (Pasolong, 2014: 41).

### **2.2 Implementasi Kebijakan Publik**

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster diimplementasikan (*to implement*) menyediakan cara untuk mengimplementasikan sesuatu (berarti *to provide the means for carrying out*), dan memberikan sarana serta menjalankan sesuatu (*to give peactical effect to*) (Anggara, 2014:232).

Mazmanian dan Sabatier menjelaskan hakikat implementasi kebijakan (Anggara, 2014:232) ialah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Selanjutnya menurut Gross dkk, mereka menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam proses pembuatan kebijakan sebagai berikut :

- a. Partisipasi akan mengangkat jiwa para staf yang dibutuhkan dalam siklus implementasi.

- b. Partisipasi akan meningkatkan tanggung jawab yang diharapkan untuk mencapai perubahan.
- c. Partisipasi akan memperjelas inti dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada para implementor
- d. Partisipasi akan mengurangi reintensi para pelaksana.

### **2.3 Evaluasi Kebijakan**

Menetapkan manfaat serta kegunaan sosial kebijakan atau program, dan tidak sekedar usaha untuk mendapatkan informasi terhadap hasil dari kebijakan yang trantisipasi hal tersebut merupakan bentuk usaha. Pemberian nilai terhadap “*fenomena*” yang didalamnya terdapat pertimbangan nilai (*value judgment*) tertentu, merupakan pengertian evalusai kebijakan. permasalahan yang dinilai seperti permasalahan sebuah aturan, seperti tujuan dan sasaran, kelompok sasaran yang ingin di penuhi, instrument kebijakan yang digunakan, respon dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi (Hayat, 2018:36)

#### **2.3.1 Fungsi Evaluasi Kebijakan**

Beberapa arti penting dalam analisis kebijakan dan evaluasi. Menurut Dunn (Hayat, 2018:38) memberikan pandangan mengenai fungsi kebijakan publik yakni:

1. Evaluasi memberikan informasi yang validdan dapat di percaya terhadap kebijakan.
2. Evaluasi memberikan dukungan pada penjelasan dan masukan didalam hal yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran.
3. Evaluasi meberikan dukungan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya.



### 2.3.2 Tipe Evaluasi Kebijakan

Langbein (Hayat, 2018:40) membagi tipe evaluasi kebijakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Tipe evaluasi hasil (*outcomes of public implementation*) adalah penelitian yang bergantung pada tujuan strategi. Proporsi pencapaian eksekusi kebijakan merupakan sejauh mana tujuan program yang dicapai.
2. Tipe evaluasi (*process of public policy implementation*) merupakan penelitian penilaian yang bergantung pada aturan pelaksanaan (*juklak*) dan aturan khusus (*juknis*). Proporsi pencapaian eksekusi kebijakan adalah kesamaan interaksi eksekusi suatu kebijakan dengan aturan petunjuk (*guide lines*) yang telah ditetapkan.

### 2.3.3 Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik

Palumbo megemukakan bahwa dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain kebijakan, implementasi, hingga diimplementasikan (Anggara, 2014:277). Menurut penjelasan diatas Palumbo menyimpulkan bahwa kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi berikut ini:

#### 1. Evaluasi Proses

Dimana membuat suatu aturan dan sebelum dilaksanakan dillakukan dua kali pelaksanaan evaluasi.

#### 2. Evaluasi Desain Kebijakan

Tahap dimana penilaian terhadap alternatif yang paling sedikit dengan menilai antara biaya dan tujuan (*cost-benefit analysis*).

### 3. Evaluasi Legitimasi Kebijakan

Mengukur keterbukaan suatu aturan di masyarakat (*stakeholder*) atau kelompok tujuan kebijakan tersebut.

### 4. Evaluasi Sumatif

Tahapan dimana dijalankan ketika aturan sudah dijalankan serta berpengaruh. Tujuannya yaitu menilai efektifitas kebijakan atau program serta pengaruh langsung pada saat penanganan masalah.

### 5. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif merupakan proses ini dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan kebijakan. Maksud dari evaluasi formatif dimana dapat memberikan perbaikan atau penyempurnaan program yang sudah diterapkan dengan harapan membawa perubahan kearah yang lebih baik.

#### a. Aspek-aspek Evaluasi Formatif

Aspek-aspek kinerja implementasi yang dievaluasi dalam evaluasi formatif, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Effort evaluation*, yaitu mengevaluasi ketersediaan input program.
- 2) *Performance evaluation*, yaitu mengkaji hasil terhadap masukan program.
- 3) *Effectiveness evaluation*, yaitu mengkaji pelaksanaannya sesuai dengan sasaran dan tujuan.
- 4) *Efficiency evaluation*, yaitu mengukur pengeluaran dengan hasil yang didapat.
- 5) *Process evaluation*, yaitu menilai teknik pelaksanaan.

Menurut William N. Dunn (Anggara, 2014:279-280), aspek-aspek kinerja kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1** Indikator Evaluasi Kebijakan Publik

<b>Indikator Evaluasi</b>	<b>Pertanyaan</b>
Efektifitas	Apakah hasil dan kebijakan yang diinginkan telah tercapai?
Efesiensi	Seberapa banyak upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa banyak pencapaian upaya dari kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat dari kebijakan itu sudah dapat dibagikan secara keseluruhan
Responsivitas	Apakah hasil dari kebijakan sudah memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) kebijakan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

**Sumber:** Kategori Evaluasi (Anggara, 2014:279-280)

Berdasarkan indikator diatas dapat dijabarkan :

#### 1. Efektivitas

Efektivitas berisi perasaan mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan tertentu. Efektivitas juga disebut hasil yang berguna. Efektivitas berkaitan dengan upaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diinginkan. Berkaitan erat terhadap kebenaran teknik, unit layanan atau nilai keuangannya, dan juga, menunjukkan sejauh mana strategi kebijakan publik berjalan secara benar dengan hasil yang telah ditetapkan.

#### 2. Efisien

Efisiensi sehubungan banyaknya upaya yang dibuat guna mendapatkan hasil efektivitas tertentu. Kebijakan dikatakan mencapai hasil maksimal dengan dana

minimum disebut efisien. Tujuan kebijakan publik sangat mendasar, harga yang ditimbulkan terhadap proses kebijakan sangat besar terhadap jumlah penerimaan. Artinya kegiatan kebijakan boros serta belum tepat dilakukan.

### 3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik merupakan sesuatu hal dicapai sudah dirasakan secara merata dengan semua cara dengan memenuhi apa saja yang di perlukan ketika mengatasi permasalahan. Berdasarkan konsep di atas, dapat dibidang bahwa kecukupan masih dikaitkan dengan efektivitas dengan menghitung atau memperkirakan sejauh mana alternatif dapat memenuhi kebutuhan, nilai atau peluang dalam mengatasi persoalan yang muncul.

### 4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan pemerataan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn mengungkapkan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) diidentikan dengan kenyataan yang benar, sosial dan menunjuk pada penyampaian hasil dan usaha yang tidak memihak. Kebijakan terletak pada hasil atau upaya yang merata. Sebuah proram mungkin akan layak dan memadai apabila biaya dan manfaat seimbang. Kunci dari perataan yaitu kesetaraan dan kewajaran.

### 5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik merupakan tanggapan terhadap kegiatan. Ini berarti respon kebijakan publik terhadap implementasi kebijakan. Kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, prioritas, atau nilai-nilai sekelompok orang. Kesuksesan kebijakan tersebut dapat diketahui melalui respons publik terhadap

implementasi terlebih dahulu mempredikasikan efek yang akan timbul ketika sebuah kebijakan diterapkan, serta respons masyarakat pasca efek kebijakan mulai dirasakan dalam bentuk dukungan positif atau bentuk penolakan.

#### 6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya pendapat yang dasar tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan/kelayakan (*appropriateness*) adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memilih yang akan digunakan sebagai bahan dengan mengevaluasi apakah efek samping dari opsi yang disarankan adalah keputusan objektif yang dapat dicapai. Mengingat fakta bahwa aturan ini menyangkut tujuan substansi), misalnya efek lain yang tidak dapat diantisipasi sebelum efeknya positif maupun negatif atau dapat dibayangkan bahwa opsi yang berbeda dianggap lebih baik di bandingkan dengan pelaksanaan kebijakan, sehingga pendekatan lebih kuat.

### 2.4 Pengertian Reklame

Pengertian reklame menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Izin Reklame menyatakan bahwa Reklame suatu alat, tindakan media dimana memiliki ciri ragam, dibuat dengan maksud menjual. Menyajikan, menyambut, mengangkat atau menarik perhatian terhadap barang, individu atau elemen yang dapat dibaca, dilihat, didengar dan dirasakan serta sangat berpotensi. Reklame termasuk cara memberitahuan secara langsung mengenai sesuatu produk, dengan menampilkan kelebihan atau penampilan dengan bertujuan supaya produk yang dimaksud ramai di pasaran, pengertian tersebut berdasarkan kamus besar

Bahasa Indonesia. Perusahaan membutuhkan media dalam mempromosikan produknya sehingga reklame adalah salah satu cara yang banyak digunakan

#### 1. Jenis jenis Reklame

- a. Reklame billboard atau megatron, adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, fiber, glass, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang ditempat yang telah disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara lain digantungkan atau ditempel pada benda lainnya.
- b. Reklame kain atau umbul umbul, sepamduk, banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor.
- c. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempel atau dipasang pada benda lain.
- d. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakkan pada tempat lain.
- e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang dilakukan dengan cara berjalan atau memutar dimana reklame tersebut ditempelkan dikendaraan.
- f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat dan alat lain yang sejenisnya.

- g. Reklame suara merupakan reklame yang dilakukan dengan memakai kata-kata yang diucapkan atau mengeluarkan suara yang ditimbulkan dari perantara alat.
- h. Reklame filem adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau filem ataupun bahan-bahan lain yang sejenisnya.
- i. Reklame peragaan adalah reklame yang dilakukan dengan teknik memperagakan suatu barang dengan dan tanpa disertai suara.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

- 1) Penelitian Reza Septian Nugraha dkk program jurusan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya dengan judul Evaluasi Kebijakan Penataan Dan Sistem Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Malang. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No.1: 128-136 (2013). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan penataan dan sistem pemungutan pajak reklame, serta faktor kendala dalam penataan dan pemungutannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus permasalahan adalah (1) Kebijakan Penataan dan Sistem Pemungutan Pajak, (2) Faktor Kendala Dalam Penataan dan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Malang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan penataan reklame yang dilakukan oleh DPPKA kabupaten malang belum maksimal, ada beberapa penyebab sehingga tidak sesuai perda yang telah ditetapkan (Reza, 2013).

2) Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Mengenai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 Terkait Dengan Penertiban Izin Reklame Videotron di Kota Surabaya merupakan penelitian dari Genis Armoyo. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, ISSN 332-343 (2014). Dalam hal ini menjaga estetika kota Surabaya di maksudkan ketika para pengusaha biro reklame yang ingin mendirikan usahanya di ruang publik mereka harus menaati peraturan yang sudah ditentukan agar ketika mereka menyelenggarakan usahanya di ruang publik itu tidak sampai menimbulkan kesenjangan dilapangan. Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh panneliti sendiri dalam implementasi kebijakan perizinan reklame vidiotron ini menunjukkan bahwa kineja pemerintah kota Surabaya beserta dinas pemberi izin sendiri sudah melaksanakan tugasnya dengan baik namun dalam penyelenggaraan dilapangan ditemukan fenomena politik yang menjembatani proses perizinan reklame vidiotron dengan latar belakang sosil para elit pengusaha reklame agar proses perizinan mereka dapat dipermudah (Armoyo, 2014). Penelitian ini dilakukan oleh Yan Suprandy Djabier dengan judul Implementasi Kebijakan Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Palu. Vol 3 No 11, ISSN: 2302-2019 (2015). *Motivation behind this examination is to comprehend the compliane of Mayoral guideline goals on the execution of the board through the execution cycle. The idea utilized in this investigation comes from the execution of Van Meter and Van Horn, the essential size and strategy goals, strategy assets, correspondence among associations and execution activites,*



*normal for the carrying out organizations, monetary climate, inclination of the implementers. The consequences of this exploration show that fundamentally, the six pointers have been very acceptable, however the correspondence among the establishments should be worked on all together that the coordination of the five offices that carry out the arrangement can function admirably. Besides, HR are additionally not maximal in executing the strategy because of absence of faculty taht making it hard to amplify the mayoral guideline (Mirza 2019).*

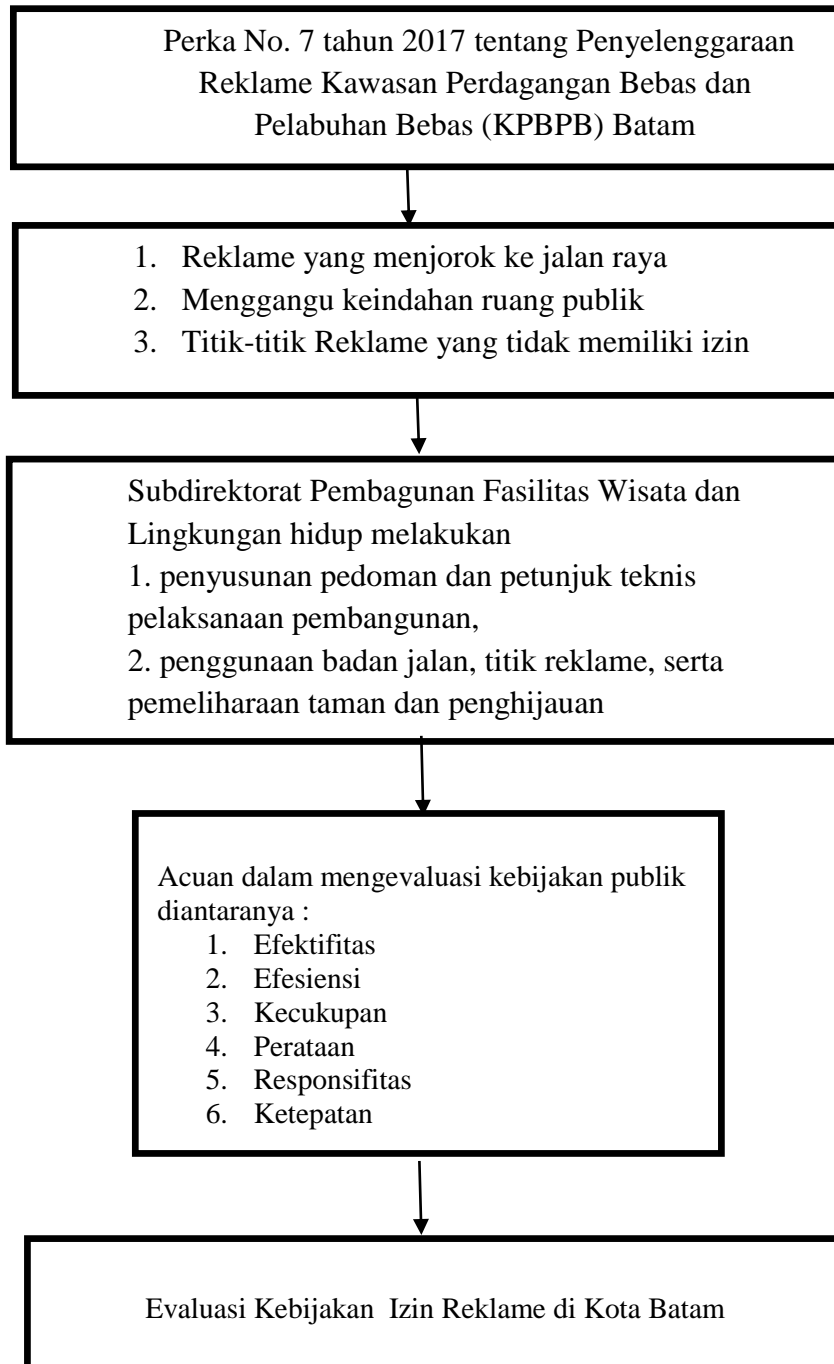
- 3) Efektifitas Pengawasan Perizinan Reklame di Kota Surabaya, Penelitian ini dilakukan oleh Agnesia Margaretha Gunawan. Jurnal ini diterbitkan oleh FISP. ISSN 2303-321X, Vol. 3, No. 3 (2015). Tujuan studi ini mendeskripsikan efektifitas perizinan reklame di kota Surabaya. Itu disebabkan tingginya pelanggaran dimana tidak memiliki izin sehingga terjadi kenaikan terus-menerus. Agar penjagaan dalam perizinan berjalan sesuai, diperlukan perbandingan masukan dan hasil penjagaan (Mirza 2019).
- 4) Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang merupakan judul penelitian Abdul Haris Nur Sugeng dan Retno Wulan Sekarsari. Jurnal ini diterbitkan oleh JISOP. Vol. 1, No. 1, ISSN 2656-1565 (2019). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi-strategi Pemerintah kota Malang dalam penertiban pemasangan banner dan reklame ilegal disepanjang jalan Sukarno Hatta sampai jalan Tlogomas dan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pemerintah Kota Malang dalam pengawasan dan penertiban terhadap

pemasangan banner dan reklame ilegal disepanjang jalan Tlogomas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Terjun ke arah pedoman kontrol dan pengawasan seperti implementasi hukum dan kosekwensi yang merugikan untuk memastikan kepentingan publik, maka perlu di lakukan pengaturan tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame (Abdul&Reza, 2019).

- 5) Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Rangka Penertiban Reklame Di Kota Denpasar, Penelitian ini dilakukan oleh I Made Andika Wesnala dkk, dengan judul . Jurnal ini diterbitkan Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 4, E-ISSN 2303-0585 (2018). Melakukan kegiatan, pengawasan, dan perapian reklame tanpa izin sudah dilakukan pencabutan dan kerapian oleh anggota penyelenggara reklame (Andika Made, 2018).
- 6) Penelitian ini dilakukan oleh Bahru Harahap, Syahril Effendi, dengan judul Analisis Kinerja Pemungutan Dan Retribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. JIM UPB Vol 8 No.2 2020, E-ISSN: 2549-9591 (2020). Penelitian ini ingin menguji Kinerja Pemungutan dan Retribusi Pungutan Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Adapun beberapa kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1).Kinerja Pemungutan Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam. 2).Pungutan Retribusi Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.

3). Kinerja Pemungutan Pajak Reklame dan Pungutan Retribusi Pajak Reklame secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam (Harahap and Effendi 2020).

## 2.6 Kerangka Berfikir



**Gambar 2.1** Kerangka Berfikir.